



PARADIGMA: JURNAL KALAM DAN FILSAFAT

Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin

Vol. 7, No. 2, Desember 2025, (131-154)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/paradigma>

Wahyu dan Rasionalitas sebagai Dasar Moralitas: Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Taqî Misbâh al-Yazdî dan Franz Magnis-Suseno

Andrio Putra Tahiro R,¹ Fardiana Fikria Qur'Any,²

^{1,2} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

¹andrioputra185@gmail.com, ²fardiana.qurany@uinjkt.ac.id

Abstrak:

Hubungan antara agama dan moralitas merupakan salah satu persoalan mendasar dalam filsafat moral kontemporer. Sebagian pemikir memandang wahyu sebagai sumber utama nilai-nilai moral, sedangkan yang lain menempatkan rasionalitas manusia sebagai dasar otonomi moral. Artikel ini bertujuan menganalisis secara komparatif pemikiran Muhammad Taqî Misbâh al-Yazdî dan Franz Magnis-Suseno mengenai fondasi moralitas religius serta kemungkinan dialog antara wahyu dan akal dalam pembentukan tindakan moral. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif melalui analisis komparatif terhadap karya-karya utama kedua tokoh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Misbâh al-Yazdî memandang wahyu sebagai sumber normatif tertinggi yang memberikan legitimasi sekaligus orientasi bagi tindakan moral, sementara Magnis-Suseno menempatkan rasionalitas, kebebasan, dan hati nurani sebagai dasar utama moralitas tanpa menafikan pentingnya agama sebagai sumber inspirasi etis. Meskipun berangkat dari paradigma epistemologis yang berbeda, kedua pemikir sama-sama menegaskan bahwa moralitas harus mengarahkan manusia kepada kebaikan universal, penghormatan terhadap martabat manusia, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa relasi antara wahyu dan akal tidak harus dipahami secara dikotomis, tetapi dapat direkonstruksi sebagai hubungan yang saling melengkapi dalam membangun fondasi moral masyarakat plural.

Kata Kunci: : Moralitas religius; wahyu; rasionalitas; Muhammad Taqî Misbâh al-Yazdî; Franz Magnis-Suseno.

Abstract:

The relationship between religion and morality remains one of the central debates in contemporary moral philosophy. While some philosophers regard divine revelation as the ultimate foundation of moral values, others argue that morality is grounded primarily in human reason and autonomy. This article offers a comparative analysis of the moral philosophies of Muhammad Taqî Misbâh al-Yazdî and Franz Magnis-Suseno, focusing on the relationship between revelation and reason as the foundation of religious morality. Employing qualitative library research with a comparative philosophical approach, the study examines the principal works of both thinkers. The findings reveal that Misbâh al-Yazdî considers revelation to be the supreme normative source that legitimizes and directs moral conduct, whereas Magnis-Suseno emphasizes reason, freedom, and conscience as the primary basis of morality while acknowledging the ethical significance of religion. Despite their different epistemological orientations, both thinkers converge in viewing morality as a means of cultivating universal goodness, respect for human dignity, and social responsibility. This study argues that revelation and reason should not be understood as competing sources of morality but as complementary foundations for developing ethical life in a pluralistic society.

Keywords: Religious morality; revelation; reason; Muhammad Taqî Misbâh al-Yazdî; Franz Magnis-Suseno; comparative philosophy.

Pendahuluan

Hubungan antara agama dan moralitas merupakan salah satu persoalan klasik yang terus diperdebatkan dalam filsafat moral dan filsafat agama. Perdebatan tersebut berpusat pada pertanyaan mendasar mengenai sumber legitimasi tindakan moral: apakah nilai baik dan buruk bersumber dari wahyu Ilahi atau dapat ditentukan melalui rasionalitas manusia secara independen. Persoalan ini telah muncul sejak dialog *Euthyphro* karya Plato yang mempertanyakan apakah suatu tindakan menjadi baik karena diperintahkan oleh Tuhan, ataukah Tuhan memerintahkannya karena tindakan tersebut memang baik. Dilema tersebut kemudian melahirkan dua kecenderungan besar dalam filsafat moral,

yaitu moralitas yang berlandaskan wahyu (*divine command theory*) dan moralitas yang berlandaskan rasionalitas manusia.¹

Dalam tradisi agama-agama Abrahamik, moralitas dipahami sebagai manifestasi kehendak Tuhan yang diwahyukan kepada manusia sehingga kebaikan memperoleh legitimasi dari otoritas Ilahi. Sebaliknya, filsafat modern mengembangkan pandangan bahwa manusia memiliki kemampuan rasional untuk menentukan baik dan buruk tanpa harus bergantung sepenuhnya pada wahyu. Immanuel Kant, misalnya, menempatkan rasio praktis sebagai dasar universal moralitas melalui konsep *categorical imperative*, sedangkan Jeremy Bentham dan John Stuart Mill mengembangkan utilitarianisme yang menilai tindakan berdasarkan manfaat yang dihasilkannya.² Di sisi lain, Friedrich Nietzsche mengkritik moralitas religius karena dipandang membatasi kebebasan dan kreativitas manusia melalui apa yang disebutnya sebagai *slave morality*.³

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan agama dan moralitas tidak pernah dipahami secara tunggal. Sebagian pemikir memandang bahwa moralitas kehilangan dasar objektif apabila dilepaskan dari wahyu, sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa akal manusia telah memadai untuk menjadi fondasi tindakan moral. Persoalan ini semakin penting dalam masyarakat modern yang plural, ketika individu dengan latar belakang agama dan pandangan hidup yang berbeda harus membangun kehidupan bersama berdasarkan nilai-nilai moral yang dapat diterima secara universal.

Perdebatan tersebut memperoleh bentuk yang menarik dalam pemikiran Muhammad Taqî Misbâh al-Yazdî dan Franz Magnis-Suseno. Keduanya sama-

¹ Christian B. Miller, "Euthyphro Dilemma," dalam *The International Encyclopedia of Ethics*, ed. Hugh LaFollette (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013), 1–9.

² Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, ed. dan trans. Mary Gregor dan Jens Timmermann (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 37–45; Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Kitchener, ON: Batoche Books, 2000), 24–31.

³ Reginald John Hollingdale, *Nietzsche: The Man and His Philosophy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 241–255.

sama membahas hubungan agama dan moralitas, tetapi berangkat dari paradigma epistemologis yang berbeda. Misbâh al-Yazdî menempatkan wahyu sebagai sumber normatif tertinggi yang memberikan legitimasi terhadap seluruh nilai moral. Akal memiliki fungsi penting untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, tetapi tidak dapat menjadi sumber moralitas yang berdiri sendiri.⁴ Sebaliknya, Franz Magnis-Suseno memandang bahwa moralitas bertumpu pada rasionalitas, kebebasan, dan hati nurani manusia. Agama tetap mempunyai arti penting sebagai sumber motivasi dan inspirasi etis, tetapi tidak menjadi satu-satunya dasar legitimasi moral.⁵

Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada pertentangan antara agama dan moralitas, melainkan pada cara memahami relasi antara wahyu dan akal sebagai fondasi tindakan moral. Oleh karena itu, dialog antara kedua pemikiran tersebut menjadi penting untuk menjelaskan apakah moralitas religius harus dipahami secara eksklusif melalui wahyu atau justru dapat dibangun melalui hubungan yang saling melengkapi antara wahyu dan rasionalitas.

Kajian mengenai kedua tokoh sebenarnya telah dilakukan dalam beberapa penelitian terdahulu. Beta Firmansyah dkk. mengkaji kritik Muhammad Taqî Misbâh al-Yazdî terhadap eksistensialisme Jean-Paul Sartre melalui konsep kebebasan manusia.⁶ Al-Aimin membahas hubungan antara iman dan nilai moral menurut Misbâh al-Yazdî, sedangkan Putri Nabila Inaku menelaah kritik Misbâh al-Yazdî terhadap moral intuisiisme Barat.⁷ Pada sisi lain, kajian mengenai

⁴ Muhammad Taqî Misbâh al-Yazdî, *Filsafat Moral: Sebuah Pengantar*, trans. Ammar Fauzi (Jakarta: Sadra Press, 2019), 201–225.

⁵ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 13–39.

⁶ Beta Firmansyah et al., "Manusia dan Kebebasan dalam Pandangan Taqî Misbah Yazdi: Studi Kritis terhadap Jean Paul Sartre," *Aqlania* 14, no. 1 (2023): 89–116.

⁷ Al Aimin, "Hubungan Nilai Moral dan Iman Menurut Pandangan Taqî Misbah Yazdi" (Skripsi, STFI Sadra, Jakarta, 2021); Putri Nabila Inaku, "Kritik Moral Intuisiisme Barat dalam Pandangan Muhammad Taqî Misbah Yazdi," *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 9, no. 1 (2023): 118–134.

Franz Magnis-Suseno lebih banyak membahas konsep etikanya, penerapan etika dalam pendidikan, maupun relevansinya terhadap moderasi beragama.⁸

Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut masih mengkaji kedua tokoh secara terpisah. Hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara khusus memperbandingkan pemikiran Muhammad Taqî Misbâh al-Yazdî dan Franz Magnis-Suseno mengenai fondasi moralitas religius. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk menjelaskan persamaan, perbedaan, dan kemungkinan titik temu kedua pemikir tersebut dalam memahami hubungan antara wahyu, akal, dan legitimasi moral.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis secara komparatif konsep moral religius menurut Muhammad Taqî Misbâh al-Yazdî dan Franz Magnis-Suseno. Analisis difokuskan pada tiga aspek, yaitu dasar epistemologis moralitas, relasi antara wahyu dan rasionalitas, serta implikasinya terhadap kehidupan masyarakat plural. Artikel ini berargumen bahwa meskipun kedua tokoh berangkat dari paradigma yang berbeda, keduanya sama-sama menempatkan moralitas sebagai sarana pembentukan manusia yang bertanggung jawab. Perbedaannya terletak pada sumber legitimasi moral: Misbâh al-Yazdî menempatkan wahyu sebagai fondasi normatif tertinggi, sedangkan Magnis-Suseno memberikan otonomi yang lebih besar kepada rasionalitas manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa wahyu dan akal tidak harus dipahami sebagai dua sumber moral yang saling bertentangan, tetapi dapat direkonstruksi sebagai dua dimensi yang saling melengkapi dalam membangun moralitas masyarakat plural.

⁸ Ipel Gunadi, "Konsep Etika Menurut Franz Magnis Suseno" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017); Rici Rici, A. D. Firmanto, dan Nanik Wijiyati Aluwesia, "Etika Kuliah Daring Seminari Tinggi San Giovanni XXIII dalam Perspektif Etika Franz Magnis Suseno," *Jurnal Pendidikan Katolik* 1, no. 2 (2021): 68–77; Theguh Saumantri dan Bisri Bisri, "Moderasi Beragama Perspektif Etika (Analisis Pemikiran Franz Magnis Suseno)," *Jurnal Ilmiah Falsafah* 9, no. 2 (2023): 98–114.

Konsep Moral dan Etika sebagai Kerangka Analisis

Sebelum membandingkan pemikiran Muhammad Taqî Misbâh al-Yazdî dan Franz Magnis-Suseno mengenai moral religius, perlu dijelaskan terlebih dahulu perbedaan konseptual antara etika dan moralitas. Kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian dalam percakapan sehari-hari, padahal dalam filsafat keduanya memiliki ruang lingkup yang berbeda. Perbedaan ini penting karena objek kajian artikel ini tidak hanya berkaitan dengan perilaku moral, tetapi juga dengan landasan filosofis yang digunakan untuk menilai suatu tindakan sebagai baik atau buruk.

Secara etimologis, istilah *etika* berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan, watak, atau karakter, sedangkan *moral* berasal dari bahasa Latin *mos (mores)* yang memiliki arti serupa, yaitu adat kebiasaan atau tata perilaku. Meskipun memiliki akar makna yang hampir sama, dalam perkembangan filsafat modern kedua istilah tersebut memperoleh fungsi yang berbeda. Moral merujuk pada seperangkat nilai, norma, atau aturan yang hidup dalam masyarakat mengenai bagaimana manusia seharusnya bertindak, sedangkan etika merupakan refleksi filosofis yang bersifat kritis terhadap norma-norma tersebut. Dengan kata lain, moral merupakan objek yang dinilai, sedangkan etika adalah disiplin ilmu yang mengkaji dasar, rasionalitas, dan validitas penilaian moral.⁹

Franz Magnis-Suseno menegaskan bahwa moral adalah ajaran praktis mengenai baik dan buruk yang diwujudkan dalam nasihat, perintah, larangan, maupun kebiasaan hidup masyarakat. Sebaliknya, etika merupakan pemikiran kritis dan sistematis mengenai ajaran-ajaran moral tersebut. Oleh karena itu, etika tidak secara langsung mengajarkan apa yang harus dilakukan, tetapi mempertanyakan mengapa suatu tindakan dinilai baik, apa dasar kewajiban moral, serta bagaimana suatu norma dapat dipertanggungjawabkan secara

⁹ Agustinus W. Dewantara, *Filsafat Moral: Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia* (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 1–5.

rasional.¹⁰ Pandangan ini menunjukkan bahwa etika bekerja pada tataran reflektif, sedangkan moralitas berada pada tataran praksis.

Perbedaan tersebut menjadikan etika bersifat lebih universal dibandingkan moralitas. Moral dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya karena dipengaruhi oleh agama, budaya, sejarah, maupun sistem sosial yang berkembang. Sebaliknya, etika berusaha menemukan prinsip-prinsip umum yang dapat menjelaskan mengapa suatu norma layak diterima atau ditolak. Karena itu, pertanyaan etis tidak berhenti pada apakah suatu tindakan sesuai dengan kebiasaan masyarakat, tetapi apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan secara rasional dan memiliki nilai kemanusiaan yang universal.¹¹

Salah satu contoh penting dalam tradisi filsafat adalah etika deontologis Immanuel Kant. Kant berpendapat bahwa nilai moral suatu tindakan tidak ditentukan oleh akibat yang dihasilkan, melainkan oleh kesesuaiannya dengan kewajiban moral (*duty*). Seseorang dikatakan bertindak secara moral apabila ia melakukan suatu tindakan karena menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, bukan karena mengharapkan keuntungan atau menghindari hukuman. Dengan demikian, rasionalitas menjadi dasar utama legitimasi moral karena manusia dipandang memiliki kemampuan untuk mengenali prinsip-prinsip moral yang bersifat universal melalui akal budinya.¹²

Berbeda dengan etika yang bersifat reflektif, moralitas lebih berkaitan dengan praktik kehidupan sehari-hari. Moral berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku individu dalam kehidupan sosial sehingga memungkinkan terciptanya keteraturan, kepercayaan, dan kehidupan bersama yang harmonis. Oleh sebab itu, moralitas selalu memiliki dimensi kontekstual karena dipengaruhi

¹⁰ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 13–18.

¹¹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar*...., 18–23; Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1–5.

¹² Immanuel Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, trans. Mary Gregor and Jens Timmermann (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 37–49.

oleh sistem nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Namun demikian, kenyataan bahwa moral dapat berbeda-beda tidak serta-merta berarti bahwa seluruh nilai moral bersifat relatif. Justru pada titik inilah filsafat moral berusaha menjelaskan apakah terdapat dasar objektif yang memungkinkan manusia membedakan antara tindakan yang benar dan yang salah.¹³

Persoalan mengenai dasar objektivitas moral inilah yang menjadi salah satu tema utama dalam filsafat moral kontemporer. Sebagian pemikir berpendapat bahwa nilai moral memperoleh legitimasi dari rasionalitas manusia sehingga dapat dipahami tanpa bergantung pada wahyu agama. Sebaliknya, sebagian yang lain menegaskan bahwa moralitas memerlukan dasar transenden karena akal manusia memiliki keterbatasan dalam menentukan tujuan akhir kehidupan. Perdebatan tersebut melahirkan dua kecenderungan besar, yaitu moralitas yang bertumpu pada otonomi rasional dan moralitas yang bertumpu pada otoritas wahyu.¹⁴

Kerangka konseptual tersebut menjadi titik tolak untuk memahami perbedaan pemikiran Muhammad Taqî Misbâh al-Yazdî dan Franz Magnis-Suseno. Yazdî memandang bahwa moralitas memiliki dasar ontologis yang bersumber dari Tuhan sehingga wahyu menjadi fondasi normatif tertinggi bagi tindakan manusia. Akal tetap memiliki fungsi penting, tetapi hanya sebagai sarana untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang berasal dari wahyu. Sebaliknya, Magnis-Suseno menempatkan rasionalitas dan kebebasan manusia sebagai dasar otonomi moral, sementara agama berfungsi memperdalam motivasi etis tanpa menjadi satu-satunya sumber legitimasi moral. Perbedaan titik pijak inilah yang menjadi fokus analisis komparatif dalam artikel ini.

Dengan demikian, pembedaan antara etika dan moral tidak hanya berfungsi

¹³ Agustinus W. Dewantara, *Filsafat Moral*, 6–10.

¹⁴ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar*, 23–30; Muhammad Taqî Misbâh al-Yazdî, *Filsafat Moral: Sebuah Pengantar*, terj. Ammar Fauzi (Jakarta: Sadra Press, 2019), 45–58.

sebagai klarifikasi terminologis, tetapi juga menjadi landasan metodologis dalam membaca kedua tokoh. Etika digunakan sebagai kerangka analitis untuk mengkaji dasar filosofis moralitas, sedangkan moralitas menjadi objek yang dibandingkan, khususnya mengenai hubungan antara wahyu, rasionalitas, dan legitimasi tindakan moral. Melalui kerangka ini, analisis selanjutnya tidak berhenti pada deskripsi pemikiran kedua tokoh, tetapi diarahkan untuk menjelaskan bagaimana masing-masing membangun fondasi moral religius serta implikasinya bagi kehidupan masyarakat plural.

Moralitas Berbasis Wahyu dalam Pemikiran Muhammad Taqî Misbâh al-Yazdî

Muhammad Taqî Misbâh al-Yazdî merupakan salah satu filsuf Muslim kontemporer yang memberikan perhatian besar terhadap persoalan hubungan antara agama dan moralitas. Berbeda dengan tradisi filsafat moral modern yang cenderung menempatkan rasionalitas sebagai sumber utama legitimasi tindakan moral, Misbâh al-Yazdî memandang bahwa moralitas memiliki dasar ontologis yang bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu, nilai baik dan buruk tidak semata-mata ditentukan oleh pertimbangan rasional manusia, melainkan berakar pada kehendak dan hikmah Ilahi yang diwahyukan melalui agama.¹⁵

Pandangan tersebut berangkat dari asumsi bahwa realitas moral bersifat objektif (*objective morality*). Kebaikan tidak berubah karena kesepakatan sosial ataupun preferensi individu, tetapi memiliki keberadaan yang independen dari kehendak manusia. Dalam perspektif ini, Tuhan merupakan sumber segala nilai karena Dialah Pencipta sekaligus tujuan akhir seluruh eksistensi. Moralitas memperoleh legitimasi bukan karena disepakati oleh masyarakat, melainkan

¹⁵ Muhammad Taqî Misbâh al-Yazdî, *Filsafat Moral: Sebuah Pengantar*, terj. Ammar Fauzi (Jakarta: Sadra Press, 2019), 15–32.

karena selaras dengan kehendak Tuhan yang bersifat absolut. Dengan demikian, hubungan antara agama dan moralitas menurut Misbâh al-Yazdî bukan bersifat instrumental, tetapi ontologis.¹⁶

Konsekuensi dari pandangan tersebut adalah bahwa wahyu menempati posisi sentral dalam sistem moral. Wahyu tidak hanya berfungsi memberikan informasi mengenai perintah dan larangan agama, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan tentang tujuan akhir kehidupan manusia (*al-ghāyah al-quṣwā*). Akal memang memiliki kemampuan mengenali sebagian nilai moral, seperti keadilan, kejujuran, dan kasih sayang, tetapi kemampuan tersebut bersifat terbatas karena dipengaruhi oleh kondisi psikologis, pengalaman, dan lingkungan sosial manusia. Oleh sebab itu, akal memerlukan bimbingan wahyu agar mampu memahami tujuan moral secara utuh.¹⁷

Pandangan ini menunjukkan bahwa Misbâh al-Yazdî tidak menolak fungsi rasio. Sebaliknya, ia menempatkan akal sebagai instrumen epistemologis yang sangat penting dalam memahami wahyu. Melalui akal, manusia dapat mengenali keberadaan Tuhan, memahami makna teks keagamaan, serta mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan. Akan tetapi, akal tidak memiliki otoritas untuk menentukan nilai moral secara independen dari wahyu. Dengan kata lain, fungsi akal bersifat interpretatif, sedangkan fungsi wahyu bersifat normatif.¹⁸

Kedudukan wahyu sebagai fondasi moral juga berkaitan erat dengan pandangan Misbâh al-Yazdî mengenai hakikat manusia. Ia memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi jasmani dan ruhani sekaligus. Karena itu, tujuan moralitas tidak hanya menciptakan keteraturan sosial, tetapi juga mengantarkan manusia menuju kesempurnaan spiritual (*al-kamāl al-insānī*). Setiap tindakan moral dinilai baik apabila membantu manusia mendekat kepada

¹⁶ Muhammad Taqî Misbâh al-Yazdî, *Filsafat Moral*: ..., 45–67.

¹⁷ Muhammad Taqî Misbâh al-Yazdî, *A Philosophical Instruction*, trans. M. Legenhausen dan Azim Sarvdalir (Binghamton, NY: Global Publications, 1999), 487–502.

¹⁸ Misbâh al-Yazdî, *Filsafat Moral*, 72–94.

Tuhan dan mengaktualisasikan potensi ruhaniyahnya. Sebaliknya, tindakan yang menjauhkan manusia dari tujuan tersebut dipandang sebagai tindakan yang buruk, sekalipun mungkin memberikan keuntungan material atau sosial dalam jangka pendek.¹⁹

Pandangan teleologis ini membedakan moralitas religius Misbâh al-Yazdî dari teori-teori moral sekuler yang menjadikan kesejahteraan, kebahagiaan, atau manfaat sosial sebagai tujuan akhir tindakan manusia. Dalam sistem etikanya, seluruh nilai moral memperoleh makna karena diarahkan kepada tujuan transenden, yaitu penghambaan kepada Allah (*'ubūdiyyah*). Oleh sebab itu, kejujuran, keadilan, amanah, maupun kasih sayang bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan bagian dari proses penyempurnaan diri sebagai hamba Tuhan.²⁰

Meskipun menempatkan wahyu sebagai dasar moralitas, Misbâh al-Yazdî tidak mengabaikan pentingnya kebebasan manusia. Moralitas justru hanya bermakna apabila manusia memiliki kemampuan memilih di antara berbagai alternatif tindakan. Tanpa kebebasan, perintah dan larangan agama kehilangan makna etis karena manusia tidak lagi bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam perspektif ini, kebebasan dipahami sebagai kemampuan manusia menggunakan akal dan kehendaknya untuk memilih tindakan yang sesuai dengan petunjuk wahyu. Dengan demikian, kebebasan tidak diposisikan sebagai otonomi mutlak sebagaimana dalam filsafat moral Kant, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan penciptaan manusia.²¹

Konsep tersebut memperlihatkan hubungan erat antara moralitas dan tanggung jawab. Karena manusia diberi kebebasan, setiap tindakan memiliki konsekuensi moral yang akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di

¹⁹ Misbâh al-Yazdî, *Filsafat Moral.*, 101–118.

²⁰ Misbâh al-Yazdî, *Filsafat Moral.*, 145–166.

²¹ Beta Firmansyah, Ahmad Ropi, dan Rudi Hartono, “Manusia dan Kebebasan dalam Pandangan Taqî Misbah Yazdî: Studi Kritis terhadap Jean-Paul Sartre,” *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam* 14, no. 1 (2023): 89–116.

akhirat. Dimensi eskatologis inilah yang membedakan sistem moral religius Misbâh al-Yazdî dari banyak teori etika modern. Moralitas tidak berhenti pada penilaian sosial, tetapi memiliki konsekuensi transenden yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Oleh sebab itu, motivasi utama tindakan moral bukan sekadar penghargaan sosial atau kepuasan batin, melainkan kesadaran bahwa seluruh perbuatan berada dalam pengetahuan dan pengawasan Allah.²²

Jika dianalisis secara filosofis, konstruksi moral Misbâh al-Yazdî dibangun di atas tiga pilar utama. Pertama, ontologi moral, yaitu keyakinan bahwa nilai moral bersifat objektif karena berasal dari Tuhan sebagai sumber seluruh eksistensi. Kedua, epistemologi moral, yakni pandangan bahwa pengetahuan moral diperoleh melalui sinergi antara akal dan wahyu, dengan wahyu sebagai sumber normatif tertinggi. Ketiga, aksiologi moral, yaitu orientasi seluruh tindakan manusia menuju kesempurnaan spiritual dan kedekatan dengan Tuhan. Ketiga dimensi tersebut membentuk suatu sistem etika religius yang koheren, di mana seluruh aspek moralitas berpusat pada hubungan manusia dengan Sang Pencipta.

Dalam konteks masyarakat plural, pandangan Misbâh al-Yazdî sering dipandang menghadapi tantangan karena menjadikan wahyu sebagai dasar legitimasi moral yang bersifat partikular. Namun demikian, argumentasi tersebut tidak serta-merta menutup kemungkinan dialog dengan tradisi moral lain. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, penghormatan terhadap martabat manusia, dan tanggung jawab sosial tetap memiliki dimensi universal yang dapat diterima oleh berbagai komunitas. Perbedaannya terletak pada sumber legitimasi nilai tersebut. Jika etika sekuler menjelaskan nilai-nilai tersebut melalui rasionalitas manusia, Misbâh al-Yazdî memahaminya sebagai manifestasi kehendak Tuhan yang dapat dikenali melalui wahyu dan dipahami melalui akal. Dengan demikian, kekhasan

²² Al Aimin, "Hubungan Nilai Moral dan Iman Menurut Pandangan Taqi Misbah Yazdi" (Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra, Jakarta, 2021), 78–95.

moral religius dalam pemikirannya tidak terletak pada isi nilai-nilai moral, tetapi pada dasar metafisis yang menopang keberlakuannya.

Moralitas Berbasis Rasionalitas dalam Pemikiran Franz Magnis-Suseno

Berbeda dengan Muhammad Taqî Misbâh al-Yazdî yang menempatkan wahyu sebagai fondasi utama moralitas, Franz Magnis-Suseno memandang bahwa dasar tindakan moral terletak pada rasionalitas, kebebasan, dan hati nurani manusia. Pandangan tersebut tidak lahir dari penolakan terhadap agama, melainkan dari keyakinan bahwa manusia sebagai makhluk berakal memiliki kemampuan untuk mengenali kewajiban moral melalui refleksi kritis. Oleh karena itu, moralitas tidak bergantung sepenuhnya pada keanggotaan seseorang dalam komunitas agama tertentu, tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara rasional kepada setiap manusia.²³

Pandangan Magnis-Suseno berakar pada tradisi filsafat moral Barat, terutama etika deontologis Immanuel Kant yang menempatkan manusia sebagai subjek moral yang otonom. Namun demikian, Magnis tidak menerima begitu saja konsep otonomi Kant. Ia mengembangkannya dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius dan plural dengan menekankan bahwa kebebasan moral selalu disertai tanggung jawab terhadap sesama. Karena itu, rasionalitas dalam etikanya tidak dipahami sebagai kemampuan berpikir abstrak semata, melainkan sebagai kemampuan manusia untuk mengambil keputusan yang menghormati martabat dirinya dan orang lain.²⁴

Dalam perspektif Magnis-Suseno, moralitas tidak pertama-tama berbicara mengenai kepatuhan terhadap aturan, melainkan mengenai integritas pribadi. Seseorang disebut bermoral bukan karena sekadar menaati norma yang berlaku,

²³ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 13–39.

²⁴ Franz Magnis-Suseno, *13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani sampai Abad ke-19* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 139–164.

tetapi karena bertindak berdasarkan kesadaran bahwa tindakannya memang benar untuk dilakukan. Moralitas dengan demikian bersumber dari hati nurani yang telah dibentuk melalui refleksi rasional. Hati nurani bukan sekadar perasaan subjektif, melainkan kemampuan batin untuk menilai apakah suatu tindakan sesuai dengan nilai kemanusiaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis.²⁵

Konsep tersebut menunjukkan bahwa Magnis-Suseno membedakan secara tegas antara ketaatan dan kesadaran moral. Kepatuhan terhadap aturan belum tentu memiliki nilai moral apabila dilakukan semata-mata karena takut terhadap hukuman atau mengharapkan imbalan. Sebaliknya, tindakan yang lahir dari kesadaran mengenai kewajiban moral memiliki nilai etis karena dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab. Dengan demikian, inti moralitas bukan terletak pada tindakan lahiriahnya, tetapi pada motivasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut.²⁶

Meskipun menempatkan rasionalitas sebagai dasar moralitas, Magnis-Suseno tidak mengesampingkan peran agama. Baginya, agama memiliki fungsi yang sangat penting dalam membentuk karakter, memperkuat motivasi moral, dan memberikan horizon makna bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, agama tidak menjadi satu-satunya dasar legitimasi moral. Alasannya, masyarakat modern terdiri atas individu dengan latar belakang agama yang berbeda-beda sehingga kehidupan bersama memerlukan dasar etis yang dapat diterima secara universal. Dalam konteks inilah rasionalitas memperoleh peranan penting sebagai ruang dialog antaragama dan antarbudaya.²⁷

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan agama dan moralitas menurut Magnis-Suseno bersifat komplementer, bukan subordinatif. Agama memperkaya pengalaman moral manusia melalui nilai-nilai spiritual, sedangkan

²⁵ Magnis-Suseno, *Etika Dasar*, 40–62.

²⁶ Magnis-Suseno, *Etika Dasar*, 63–81.

²⁷ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), 25–47.

rasionalitas memastikan bahwa nilai-nilai tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam ruang publik yang plural. Dengan demikian, seseorang dapat menjadi pribadi yang religius sekaligus terbuka terhadap dialog moral dengan mereka yang memiliki keyakinan berbeda.

Orientasi moral Magnis-Suseno juga sangat dipengaruhi oleh penghormatannya terhadap martabat manusia (*human dignity*). Setiap individu dipandang memiliki nilai intrinsik sehingga tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, tindakan yang merendahkan martabat manusia—seperti korupsi, diskriminasi, kekerasan, maupun penyalahgunaan kekuasaan—tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar moralitas.²⁸

Dalam konteks Indonesia, Magnis-Suseno melihat bahwa tantangan terbesar moralitas bukanlah kurangnya norma agama, melainkan lemahnya integritas dalam kehidupan sosial dan politik. Banyak orang mengaku beragama, tetapi nilai-nilai agama tidak tercermin dalam perilaku publik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberagamaan formal belum tentu menghasilkan kedewasaan moral. Oleh sebab itu, pendidikan moral menurut Magnis-Suseno harus diarahkan pada pembentukan karakter yang menumbuhkan kejujuran, tanggung jawab, keberanian moral, dan penghormatan terhadap sesama.²⁹

Apabila dianalisis secara filosofis, sistem etika Magnis-Suseno dapat dipahami melalui tiga dimensi utama. Pertama, ontologi moral, yaitu keyakinan bahwa manusia merupakan makhluk bermartabat yang memiliki kemampuan untuk bertindak secara bebas dan bertanggung jawab. Kedua, epistemologi moral, yakni pandangan bahwa pengetahuan moral diperoleh melalui refleksi rasional,

²⁸ Franz Magnis-Suseno, *Etika Kebangsaan, Etika Kemanusiaan* (Jakarta: Kompas, 2013), 87–110.

²⁹ Theguh Saumantri dan Bisri Bisri, “Moderasi Beragama Perspektif Etika 98–114; Rici Rici, A. D. Firmanto, dan Nanik Wijiyati Aluwesia, “Etika Kuliah Daring Seminari Tinggi San Giovanni XXIII dalam Perspektif Etika Franz Magnis-Suseno,” *Jurnal Pendidikan Katolik* 1, no. 2 (2021): 68–77.

pengalaman hidup, dan dialog dengan hati nurani. Ketiga, aksiologi moral, yaitu orientasi tindakan manusia kepada penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Ketiga dimensi tersebut membentuk suatu sistem etika yang menempatkan manusia sebagai subjek moral yang otonom tanpa melepaskan dirinya dari nilai-nilai religius.

Keunggulan pemikiran Magnis-Suseno terletak pada kemampuannya membangun jembatan antara etika filosofis dan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Moralitas tidak dipandang sebagai milik eksklusif agama tertentu, tetapi sebagai ruang bersama yang memungkinkan setiap orang bekerja sama untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan manusiawi. Dengan demikian, dasar moral tidak diukur dari identitas keagamaan seseorang, melainkan dari kemampuannya menghormati martabat manusia serta bertindak secara jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Meskipun demikian, pendekatan Magnis-Suseno juga memiliki keterbatasan. Penekanannya yang kuat pada rasionalitas dapat menimbulkan pertanyaan mengenai dasar objektivitas nilai moral apabila dilepaskan dari sumber transenden. Dalam masyarakat yang memiliki sistem nilai berbeda-beda, konsensus rasional tidak selalu mudah dicapai. Di sinilah kritik dari pemikir seperti Misbâh al-Yazdî menjadi relevan, yaitu bahwa rasionalitas manusia bersifat terbatas dan memerlukan orientasi normatif yang lebih tinggi. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan antara kedua tokoh sesungguhnya tidak terletak pada tujuan moral yang ingin dicapai, tetapi pada sumber legitimasi moral yang dijadikan dasar bagi tindakan manusia.

Analisis Komparatif: Wahyu dan Rasionalitas sebagai Fondasi Moralitas

Perbandingan antara pemikiran Muhammad Taqî Misbâh al-Yazdî dan Franz Magnis-Suseno menunjukkan bahwa keduanya berangkat dari paradigma epistemologis yang berbeda dalam menjelaskan dasar moralitas. Namun,

perbedaan tersebut tidak berarti bahwa keduanya saling meniadakan. Sebaliknya, analisis terhadap kedua pemikiran memperlihatkan adanya titik temu yang memungkinkan lahirnya suatu pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara agama, rasionalitas, dan tindakan moral. Oleh karena itu, studi komparatif ini tidak diarahkan untuk menentukan superioritas salah satu pemikiran, melainkan untuk menjelaskan bagaimana kedua paradigma tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan filsafat moral dalam masyarakat plural.

Perbedaan paling mendasar tampak pada sumber legitimasi moral. Misbâh al-Yazdî menempatkan Tuhan sebagai sumber ontologis seluruh nilai sehingga wahyu menjadi dasar normatif tertinggi bagi penilaian moral. Dalam perspektif ini, tindakan dinilai baik karena sesuai dengan kehendak Tuhan yang diwahyukan kepada manusia. Akal tetap memiliki kedudukan penting, tetapi hanya sebagai sarana memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang berasal dari wahyu.³⁰

Sebaliknya, Magnis-Suseno memandang bahwa legitimasi moral bertumpu pada kemampuan rasional manusia untuk mengenali kewajiban etis. Nilai moral tidak bergantung pada identitas agama tertentu, melainkan dapat dipertanggungjawabkan melalui argumentasi rasional yang terbuka bagi setiap manusia. Oleh karena itu, agama tidak diposisikan sebagai sumber eksklusif moralitas, tetapi sebagai kekuatan yang memperdalam motivasi moral dan memperkaya pengalaman etis manusia.³¹

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua tokoh menggunakan titik berangkat epistemologis yang berbeda. Misbâh al-Yazdî bergerak dari wahyu menuju akal, sedangkan Magnis-Suseno bergerak dari akal menuju moralitas.

³⁰ Muhammad Taqî Misbâh al-Yazdî, *Filsafat Moral: Sebuah Pengantar*, terj. Ammar Fauzi (Jakarta: Sadra Press, 2019), 145–180.

³¹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 85–112.

Namun demikian, keduanya tidak menempatkan wahyu dan rasionalitas sebagai dua entitas yang saling bertentangan. Misbâh al-Yazdî tetap mengakui pentingnya akal sebagai instrumen memahami wahyu, sedangkan Magnis-Suseno tetap mengakui bahwa agama memiliki peranan penting dalam pembentukan motivasi moral. Dengan demikian, perbedaan keduanya lebih tepat dipahami sebagai perbedaan mengenai hierarki sumber legitimasi moral, bukan penolakan terhadap salah satu unsur tersebut.

Persamaan yang menarik juga tampak pada tujuan akhir moralitas. Baik Misbâh al-Yazdî maupun Magnis-Suseno sama-sama memandang bahwa moralitas tidak sekadar mengatur perilaku lahiriah, tetapi membentuk karakter manusia. Keduanya menolak pandangan yang mereduksi moralitas menjadi sekadar kepatuhan formal terhadap aturan. Moralitas justru harus menghasilkan manusia yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Perbedaannya terletak pada orientasi akhir pembentukan karakter tersebut. Misbâh al-Yazdî mengarahkannya kepada kedekatan dengan Tuhan (*taqarrub ilā Allāh*), sedangkan Magnis-Suseno menekankan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai dasar kehidupan bersama.³²

Dari perspektif aksiologi, kedua tokoh juga memperlihatkan kesamaan pada nilai-nilai moral yang mereka perjuangkan. Kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab, penghormatan terhadap sesama, dan kepedulian sosial memperoleh kedudukan penting dalam kedua sistem etika tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan dasar epistemologis tidak selalu menghasilkan perbedaan substansi moral. Dengan kata lain, wahyu dan rasionalitas dapat

³² Muhammad Taqî Misbâh al-Yazdî, *Filsafat Moral*, 181–210; Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), 25–47.

mengantarkan manusia kepada nilai-nilai moral yang relatif sama, meskipun melalui argumentasi filosofis yang berbeda.³³

Temuan tersebut memberikan implikasi penting terhadap diskursus filsafat moral kontemporer. Selama ini, hubungan antara agama dan rasionalitas sering dipahami secara dikotomis. Moral religius dianggap hanya bergantung pada wahyu, sedangkan moral sekuler dipandang hanya bertumpu pada rasionalitas. Analisis terhadap kedua pemikir justru menunjukkan bahwa dikotomi tersebut terlalu menyederhanakan persoalan. Wahyu dan rasionalitas memiliki hubungan yang lebih dinamis. Wahyu memberikan orientasi transenden dan tujuan akhir kehidupan, sedangkan rasionalitas memungkinkan manusia memahami, mengkritisi, dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam konteks sosial yang terus berubah.³⁴

Dalam masyarakat plural, relasi dialogis antara wahyu dan rasionalitas menjadi semakin penting. Masyarakat modern terdiri atas individu dengan keyakinan agama, budaya, dan pandangan hidup yang beragam sehingga ruang publik memerlukan dasar etis yang dapat diterima bersama. Dalam konteks tersebut, rasionalitas menyediakan bahasa universal yang memungkinkan dialog antartradisi moral, sedangkan agama memberikan kedalaman spiritual dan motivasi transenden yang memperkuat komitmen etis individu. Oleh karena itu, keduanya tidak perlu diposisikan sebagai dua kutub yang saling meniadakan, tetapi sebagai dua dimensi yang saling melengkapi dalam pembentukan kehidupan moral.³⁵

³³ Muhammad Taqî Misbâh al-Yazdî, *Filsafat Moral: Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Ammar Fauzi (Jakarta: Sadra Press, 2019), 181–210; Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 85–112.

³⁴ Jürgen Habermas, *Between Naturalism and Religion: Philosophical Essays*, trans. Ciaran Cronin (Cambridge: Polity Press, 2008), 109–131; Charles Taylor, *A Secular Age* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007), 505–539.

³⁵ Jürgen Habermas, *Religion in the Public Sphere*, *European Journal of Philosophy* 14, no. 1 (2006): 1–25; Nicholas Wolterstorff, *Justice: Rights and Wrongs* (Princeton: Princeton University Press, 2008), 69–95.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merekonstruksi hubungan antara wahyu dan rasionalitas ke dalam model moralitas religius integratif. Model ini berangkat dari asumsi bahwa legitimasi moral tidak harus dipahami secara eksklusif hanya melalui wahyu ataupun hanya melalui rasionalitas. Wahyu menyediakan dasar normatif dan orientasi metafisis mengenai tujuan hidup manusia, sedangkan rasionalitas memungkinkan nilai-nilai tersebut diterjemahkan menjadi prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan sosial yang plural. Dengan demikian, moralitas religius tidak kehilangan dimensi transendennya, tetapi juga tetap terbuka terhadap dialog rasional dalam ruang publik.³⁶

Rekonstruksi tersebut merupakan kontribusi utama penelitian ini. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung berhenti pada pemetaan persamaan dan perbedaan kedua tokoh, artikel ini menunjukkan bahwa perbedaan antara Misbâh al-Yazdî dan Magnis-Suseno sesungguhnya membuka kemungkinan bagi lahirnya paradigma moral yang lebih inklusif. Moralitas religius tidak harus dipahami sebagai antitesis moralitas rasional, sebagaimana moralitas rasional tidak identik dengan sekularisme. Sebaliknya, keduanya dapat dipahami sebagai dua pendekatan yang memiliki titik tekan berbeda, tetapi sama-sama berupaya membentuk manusia yang bertanggung jawab, adil, dan bermartabat.³⁷

Dengan demikian, studi komparatif ini memperlihatkan bahwa persoalan mendasar dalam filsafat moral bukanlah memilih antara wahyu atau rasionalitas, melainkan bagaimana keduanya ditempatkan secara proporsional dalam membangun kehidupan etis. Wahyu tanpa refleksi rasional berpotensi melahirkan

³⁶ David Hollenbach, *The Global Face of Public Faith: Politics, Human Rights, and Christian Ethics* (Washington, DC: Georgetown University Press, 2003), 211–228; Charles Taylor, *A Secular Age*, 539–593.

³⁷ Jeffrey Stout, *Democracy and Tradition* (Princeton: Princeton University Press, 2004), 63–91; John Rawls, *Political Liberalism*, expanded ed. (New York: Columbia University Press, 2005), 212–254.

formalisme moral yang kaku, sedangkan rasionalitas tanpa orientasi transenden berpotensi kehilangan dasar metafisis yang memberikan makna terdalam bagi tindakan manusia. Karena itu, hubungan antara wahyu dan rasionalitas lebih tepat dipahami sebagai hubungan dialogis yang memungkinkan keduanya saling memperkaya dalam membangun moralitas masyarakat modern.³⁸

Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai hubungan antara agama dan moralitas dalam pemikiran Muhammad Taqî Misbâh al-Yazdî dan Franz Magnis-Suseno tidak terletak pada tujuan moral yang ingin dicapai, melainkan pada sumber legitimasi moral yang dijadikan dasar tindakan manusia. Keduanya sama-sama membangun kerangka etika normatif yang menempatkan moralitas sebagai pedoman tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak, tetapi berangkat dari paradigma epistemologis yang berbeda. Misbâh al-Yazdî memandang wahyu sebagai sumber normatif tertinggi yang memberikan legitimasi objektif terhadap nilai-nilai moral, sedangkan Magnis-Suseno menempatkan rasionalitas, kebebasan, dan hati nurani sebagai dasar utama pertimbangan moral, tanpa menafikan peranan agama sebagai sumber inspirasi etis.

Analisis komparatif dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa perbedaan tersebut tidak harus dipahami sebagai pertentangan yang bersifat dikotomis. Baik wahyu maupun rasionalitas sama-sama berorientasi pada pembentukan manusia yang bermartabat, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai universal seperti keadilan, kejujuran, penghormatan terhadap sesama, dan tanggung jawab sosial. Perbedaannya terletak pada dasar

³⁸ Paul Ricoeur, *Oneself as Another*, translated by Kathleen Blamey (Chicago: The University of Chicago Press, 1992), 165–196; Seyyed Hossein Nasr, *Knowledge and the Sacred* (Albany: State University of New York Press, 1989), 160–176.

epistemologis dan metafisis yang digunakan untuk menjelaskan mengapa nilai-nilai tersebut memiliki kekuatan normatif.

Kontribusi utama penelitian ini adalah merekonstruksi hubungan antara wahyu dan rasionalitas sebagai dua fondasi moral yang bersifat komplementer, bukan saling meniadakan. Wahyu memberikan orientasi transenden dan dasar metafisis bagi moralitas, sedangkan rasionalitas memungkinkan nilai-nilai tersebut dipahami, dikritisi, dan diterapkan secara kontekstual dalam kehidupan masyarakat yang plural. Dengan demikian, moralitas religius tidak perlu diposisikan sebagai antitesis moralitas rasional, tetapi dapat dipahami sebagai paradigma etis yang mengintegrasikan dimensi teologis dan rasional dalam membangun kehidupan bersama yang adil, manusiawi, dan bermartabat.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian kepustakaan terhadap pemikiran kedua tokoh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model moralitas integratif ini melalui studi empiris mengenai implementasinya dalam pendidikan karakter, etika profesi, kepemimpinan publik, maupun penguatan moderasi beragama di masyarakat multikultural.

Daftar Pustaka

- Aimin, Al. *Hubungan Nilai Moral dan Iman Menurut Pandangan Taqi Misbah Yazdi*. Skripsi. Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra, Jakarta, 2021.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Kitchener, ON: Batoche Books, 2000.
- Dewantara, Agustinus W. *Filsafat Moral: Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Firmansyah, Beta, Ahmad Ropi, dan Rudi Hartono. "Manusia dan Kebebasan dalam Pandangan Taqi Misbah Yazdi: Studi Kritis terhadap Jean-Paul

- Sartre.” *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam* 14, no. 1 (2023): 89–116.
- Gunadi, Ipel. *Konsep Etika Menurut Franz Magnis Suseno*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.
- Habermas, Jürgen. *Between Naturalism and Religion: Philosophical Essays*. Translated by Ciaran Cronin. Cambridge: Polity Press, 2008.
- . “Religion in the Public Sphere.” *European Journal of Philosophy* 14, no. 1 (2006): 1–25.
- Hollenbach, David. *The Global Face of Public Faith: Politics, Human Rights, and Christian Ethics*. Washington, DC: Georgetown University Press, 2003.
- Hollingdale, Reginald John. *Nietzsche: The Man and His Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Inaku, Putri Nabila. “Kritik Moral Intusionisme Barat dalam Pandangan Muhammad Taqi Misbah Yazdi.” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 9, no. 1 (2023): 118–134.
- Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Edited and translated by Mary Gregor and Jens Timmermann. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Magnis-Suseno, Franz. *13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani sampai Abad ke-19*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- . *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- . *Etika Kebangsaan, Etika Kemanusiaan*. Jakarta: Kompas, 2013.
- . *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

- Miller, Christian B. "Euthyphro Dilemma." In *The International Encyclopedia of Ethics*, edited by Hugh LaFollette, 1–9. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013.
- Misbâh al-Yazdî, Muhammad Taqî. *A Philosophical Instruction*. Translated by M. Legenhausen and Azim Sarvdalir. Binghamton, NY: Global Publications, 1999.
- . *Filsafat Moral: Sebuah Pengantar*. Diterjemahkan oleh Ammar Fauzi. Jakarta: Sadra Press, 2019.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Knowledge and the Sacred*. Albany: State University of New York Press, 1989.
- Rawls, John. *Political Liberalism*. Expanded ed. New York: Columbia University Press, 2005.
- Rici, Rici, A. D. Firmanto, dan Nanik Wijiyati Aluwesia. "Etika Kuliah Daring Seminari Tinggi San Giovanni XXIII dalam Perspektif Etika Franz Magnis-Suseno." *Jurnal Pendidikan Katolik* 1, no. 2 (2021): 68–77.
- Ricoeur, Paul. *Oneself as Another*. Translated by Kathleen Blamey. Chicago: The University of Chicago Press, 1992.
- Saumantri, Theguh, dan Bisri Bisri. "Moderasi Beragama Perspektif Etika (Analisis Pemikiran Franz Magnis-Suseno)." *Jurnal Ilmiah Falsafah* 9, no. 2 (2023): 98–114.
- Stout, Jeffrey. *Democracy and Tradition*. Princeton: Princeton University Press, 2004.
- Taylor, Charles. *A Secular Age*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007.
- Wolterstorff, Nicholas. *Justice: Rights and Wrongs*. Princeton: Princeton University Press, 2008.